



TRIWULAN II 2025

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
Jalan PANCASILA NOMOR 12 KOTA GUNUNGSITOLI-22814.
HTTPS://pn-gunungsitoli.go.id
info@pn-gunungsitoli.go.id



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI MEDAN PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

Jln. Pancasila No. 12 Gunungsitoli – 22814 Telepon : (0639) 21344 – Fax (0639/21343) Email : info@gunungsitoli.go.id Website : www.pn-gunungsitoli.go.id

Nomor : 1437 /KPN.W2-U12/PW1.2.1/VII/2025

Gunungsitoli, 14 Juli 2025

Lampiran

: 1 (Dokumen)

Perihal

: Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Pengguna Layanan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Periode April s/d Juni 2025

Kepada Yth. Bapak Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5 Jln. Jendral Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan secara rutin per-tiga bulan sekali di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB, dengan ini kami mengirimkan laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pengguna Layanan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Periode April s/d Juni 2025 (data terlampir).

Demikian data ini kami kirimkan sebagai laporan dan atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.

Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB

Zuladly, S.H., M.H

NIP. 19760906 200112 1 002

Tembusan:

- 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta
- 2. Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan;
- 3. Arsip (Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B)

LAPORAN TRIWULAN II

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS I B

(Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017)



TAHUN 2025

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS I B (Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017)

Disahkan di Gunungsitoli 14 Juli 2025

GER Op Management,

Zulfadly, S.H., M.H NIP. 19760906 200112 1 002

Sekretaris Tim Survei,

Ketua Tim Survei,

<u>Ikuti Telaumbanua, S.H.</u>

NIP. 19840327 201101 1 010

Gabriel Lase, S.H.

NIP. 19860717 201712 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah

secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan

di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Kelas IB mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Kepuasan Masyarakat yang dapat

diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur

dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang

diinginkan/diharapkan. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman

dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB, yang diambil

melalui pengisian Aplikasi SISUPER.

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan

agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan

ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan

Negeri Gunungsitoli Kelas IB dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri

Gunungsitoli Kelas IB.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Gunungsitoli, 14 Juli 2025

Tim Survei

i

DAFTAR ISI

	Hala	man
KATA PEN	IGANTAR	i
DAFTAR IS	SI	ii
Bab I F	PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan C. Sasaran D. Prinsip E. Pelaksanaan Kerja F. Tahapan Pelaksanaan G. Target Capaian Survey	1 1 2 2 2 3 3
A B C D	METODE SURVEI A. Periode Survei B. Metode Survei C. Teknik Survei D. Variabel Pengukuran SKM E. Teknik Analisis Data	5 5 5
A B C	PROFIL RESPONDEN	10 10 11
A B C. D E. F. G.	. Waktu Pelayanan	13 14 15 16 16 17 18
A.	ESIMPULAN DAN SARAN	21 21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan menjalankan peran sebagai organisasi publik non profit yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan tujuan didirikannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat baik umum ataupun kebutuhan para pencari keadilan terhadap putusan yang berkualitas.

Filosofi berdirinya pemerintahan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi dan memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat para pencari keadilan yang memiliki karakteristik kebutuhan publik yang perlu pengaturan dalam pemenuhannya. Memberikan pelayanan merupakan tugas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sering terlupakan akibat permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah yang semakin rumit dan kompleks.

Meskipun fungsi utama Pemerintah memberikan pelayanan publik namun dalam pelaksanaannya pelayanan publik yang diberikan mencitrakan kredibilitas yang buruk dimana pelayanan yang diberikan selalu identik dengan prosedur yang tidak jelas dan berbelit-belit, persyaratan yang rumit dan tidak masuk akal, biaya pungutan di luar ketentuan, dan ketidakpastian penyelesaian. Pencitraan tersebut sangat erat kaitannya dengan karakteristik pelayanan publik itu sendiri, dimana pelayanan publik cenderung bersifat mengatur sehingga sangat jauh dari pelayanan yang baik. Hal ini menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan kualitas pelayanan yakni sering terlantarnya upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kurang berkembangnya inovasi dalam pelayanan serta kurang terpacunya pemerintah untuk memperbaiki kualitas layanan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna

Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB melaksanakan survei kepuasaan masyarakat dalam rangka pelaksaaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

B. Tujuan

Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB.

C. Sasaran

Adapun sasaran-sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB.
- Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB.
- 3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB.
- 4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B.

D. Prinsip

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dilakukan dengan memperhatikan prinsipprinsip, sebagai berikut:

1. Transparan

Hasil survei kepuasan masyarakat harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

2. Partisipatif

Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat harus melibatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya.

3. Akuntabel

Hal-hal yang diatur dalam survei kepuasan masyarakat harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku.

4. Berkesinambungan

Survei kepuasan masyarakat harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.

5. Keadilan

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

6. Netralis

Dalam melakukan survei kepuasan masyarakat, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak.

E. Pelaksanaan Kerja

Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB ini dilaksanakan pada Minggu pertama sampai minggu ke empat yaitu bulan Juli 2024. Adapun waktu pelaksanaan dari tiap tahapan dapat dilihat pada jadwal berikut ini:

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kerja

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan		
1	Persiapan	01 Juli s/d 02 Juli 2025		
2	Pengumpulan Data / Survey SKM	03 Juli s/d 04 Juli 2025		
3	Pengolahan Data	07 Juli s/d 08 Juli 2025		
4	Penyusunan dan Pelaporan	09 Juli s/d 11 Juli 2025		

F. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB, antara lain:

- 1. Tim survei menentukan metode survei, yaitu secara elektronik melalui aplikasi yang bernama SISUPER.
- 2. Tim survei mengarahkan setiap masyarakat pengguna produk layanan Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengisi survei elektronik melalui aplikasi SISUPER

- 3. Tim survei melakukan survei sesuai jadwal.
- 4. Tim mengumpulkan data, menganalisis data dari aplikasi SISUPER
- 5. Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif.

G. Target Capaian Survei

Adapun target capaian survei kepuasan masyarakat mengenai pelayanan publik di Pengadilan Negeri Gunungsitoli yaitu 4.00 atau 100% dalam kategori Sangat Baik.

BABII

METODE SURVEI

A. Periode Survei

Survei periodik adalah survei yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik terhadap layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Survei, dapat dilakukan secara tetap dengan jangka waktu (periode) tertentu. Survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dilakukan setiap 3 (tiga) bulanan.

Survei ini bersifat komprehensif dan hasil analisa survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu, hasil survei dipergunakan untuk layanan publik yang telah diberikan.

B. Metode Survei

Metode survei dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang bernama SISUPER. Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Direktur Jendral Badan Peradilan Umum yang digunakan untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, Survei Persepsi anti Korupsi dan Survei Harian.

C. Teknik Survei

Teknik survei yang dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi SISUPER dengan alamat link http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id dan link yang digunakan responden yaitu http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/ pengadilan/098696.

D. Variabel Pengukuran SKM

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, antara lain:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

E. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data pada pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB ini digunakan teknik analisis data kuantitatif. Kesembilan ruang lingkup tersebut di atas, selanjutnya disusun ke dalam kuesioner dengan 9 item, dengan empat *option* jawaban. Adapun pensekorannya menggunakan skala *Likert*, dengan skor 1 sampai dengan 4. Analisis selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 100, dan kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB ditentukan sebagai berikut:

1. Pengukuran Skala Likert

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

Bobot nilai rata-rata tertimbang =
$$\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = Bobot nilai per unsur

Bobot nilai rata-rata tertimbang =
$$\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = \frac{0}{11}$$

Untuk memperoleh nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

Untuk memudahkan interprestasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

Setiap unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

- a. Menambah unsur yang dianggap relevan;
- b. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan bobot seluruh unsur tetap 1 (satu).

Tabel 2.

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi,

Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja dan Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00- 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3, 064	65,00 – 76, 60	С	Kurang Baik
3	3, 0644 - 3, 532	76,61 – 88, 30	В	Baik
4	3, 5324 – 4, 00	88, 31 – 100,00	A	Sangat Baik

Setelah data terkumpul data pada penelitian ini disusun dalam bentuk diagram frekuensi dan dianalisis dengan analisis statistik deskriptif. Indikator penilaian skor yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Nilai Skor, Mutu dan Kinejra

NO	SKOR	MUTU	KINERJA
1	1,00 – 2,5996	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3, 064	С	Kurang Baik
3	3, 0644 - 3, 532	В	Baik
4	3, 5324 - 4, 00	A	Sangat Baik

Angka skor beserta intervalnya diperoleh dengan cara Nilai tertinggi – Nilai Terendah dibagi dengan jumlah jawaban yaitu:

Tabel 4. Kategorisasi Nilai Internal Konversi

	4-1			
		=	0,75	
	4			
NO	SKOR		MUTU	KINERJA
1	25,00- 64,99		D	Tidak Baik

4 88, 31 – 100,00 A

65,00 - 76,60

76,61 - 88, 30

1. Untuk skor minimum dalam presentase =

Nilai interval di ata diperoleh dari:

2

3

$$\frac{\text{Skor minimum}}{\text{Jenjang}} \quad X \quad 100\% \quad = \quad \frac{1}{4} \quad X \quad 100\% \quad = \quad 25\%$$

C

Kurang Baik

Baik

Sangat Baik

2. Untuk skor maksimum dalam presentase =

Skor maksimum
$$\frac{4}{\text{Jenjang}}$$
 X 100% = $\frac{4}{4}$ X 100% = 100%

3. Untuk Interval dalam presentase =

4. Sehingga untuk jenjang interval dalam presentase =

Untuk mencari nilai rata-rata tertimbang per unsur diselesaikan dengan rumus :

Nilai Rata-Rata Tertimbang Per unsur	Jumlah Total Nilai Rata-Rata Per unsur X
	Bobot rata-Rata Nilai Tertimbang

Untuk mencari nilai SKM sendiri diselesaikan dengan cara:

Nilai SKM = Total Nilai Rata-Rata Tertimbang Per unsur x Nilai Dasar

BAB III

PROFIL RESPONDEN

A. Usia Responden

Tabel 5 Responden Menurut Klasifikasi Umur Sumber Data : Hasil dari Aplikasi SISUPER

No	Klasifikasi	Frekuensi	Persen
1	18 Tahun s/d 28 Tahun	7 orang	21,21%
2	29 Tahun s/d 39 Tahun	13 orang	39,39%
3	40 Tahun s/d 49 Tahun	8 orang	24,24%
4	50 Tahun s/d 59Tahun	4 orang	12,12%
5	60 Tahun s/d 69Tahun	1 orang	3,03%
	Jumlah	33 orang	100%

Mayoritas responden ini berusia 29 Tahun s/d 39 Tahun dengan jumlah 13 (tiga belas) orang dengan persentase 39,39% (tiga puluh sembilan koma tiga puluh sembilan persen). Berdasarkan profil responden yang dipilih untuk mengisi kuisioner, pada dasarnya orang-orang yang berusia antara 29 hingga 39 tahun adalah seseorang yang sudah dewasa secara hukum dan mapan pemikirannya, sehingga jawaban yang diberikan saat mengisi kuisioner dapat obyektif.

B. Jenis Kelamin Responden

Tabel 6 Responden Menurut Klasifikasi Jenis Kelamin Sumber Data : Hasil dari Aplikasi SISUPER

No Klasifikasi		Frekuensi	
1	Laki - Laki	29 orang	
2	Perempuan	5 orang	
	Jumlah	34 orang	

Mayoritas responden ini berjenis kelamin Laki-laki yang berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang.

C. Pendidikan Terakhir Responden

Tabel 7 Responden Menurut Klasifikasi Pendidikan Sumber Data : Hasil dari Aplikasi SISUPER

No	Klasifikasi	Frekuensi
1	Tidak/Belum Sekolah	0
2	SD	1
3	SMP/SLTP	0
4	SMA / SMU	15
5	D1	0
6	D2	0
7	D3	0
8	S1	15
9	S2	3
10	S3	0
	Jumlah	34

Mayoritas pendidikan terakhir Responden disini adalah SMA dan S1 yang masing-masing berjumlah 15 (lima belas) orang. Keadaan ini menunjukkan bahwa rata-rata responden telah memiliki tingkat pendidikan yang mumpuni, meskipun data Responden dengan tingkat pendidikan S3 masih nihil. Tingkat pendidikan responden juga mempengaruhi dalam penilaian yang diberikan, walaupun tidak terlalu signifikan.

D. Pekerjaan Utama Responden

Tabel 8 Responden Menurut Klasifikasi Pekerjaan Sumber Data : Hasil dari Aplikasi SISUPER

No	Klasifikasi	Frekuensi
1	PNS	4
2	TNI	1
3	POLRI	4
4	SWASTA	6
5	WIRAUSAHA	0
6	TENAGA KONTRAK	0
6	LAINNYA	19
	Jumlah	34

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas pekerjaan utama responden adalah swasta dan lainnya yang berjumlah 25 (dua puluh lima) orang.

BABIV

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B dan hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B sebesar 4,000 atau 100% berada pada kategori "Sangat Baik" (pada interval 88, 31 – 100,00). Adapun capaian yang diharapkan pada sasaran mutu Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B yang telah ditetapkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) Hasil tersebut melampaui target sasaran mutu yang ditetapkan Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Hasil SKM tersebut di atas, terdiri dari 9 (sembilan) ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Tabel 9. Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup Pengukuran Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B

No.	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori
1	Persyaratan	4,000	Sangat Baik
2	Prosedur	4,000	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	4,000	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	4,000	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	4,000	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	4,000	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	4,000	Sangat Baik
8	Prasarana, Sarana dan Kelengkapan	4,000	Sangat Baik
9	Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan	4,000	Sangat Baik

Pengolahan Data diperoleh dengan terlebih dahulu mencari bobot rata-rata nilai tertimbang masing-masing unsur pelayanan dengan rumus sebagai berikut:

Bobot Rata-Rata Nilai =
$$\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,111$$

Kemudian untuk memperoleh nilai SKM maka harus dicari Nilai Rata-Rata Tertimbang Per unsur dengan rumus sebagai berikut :

Dengan penjabaran sebagai berikut:

Tabel 10
Jumlah Nilai, Nilai Rata-Rata (NRR) Per unsur
dan Nilai Rata-Rata (NRR) Tertimbang Per unsur
Pengukuran Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan di Pengadilan
Negeri Gunungsitoli Kelas I B

Nilai Per unsur Pelaya	Nil	Nilai Opsi Pilihan Responden Jumlah Respon	Jumlah Nilai (A+B+C	NRR per- unsur (Jumlah	NRR Tertimbang per unsur (Jumlah Total NRR per-			
nan	A	В	С	D	den	+D)	Nilai/jumlah responden)	unsur X Bobot
	4	3	2	1			respondent	Rata-Rata Nilai)
U1	34	0	0	0	34	34	4,000	0,444
U2	34	0	0	0	34	34	4,000	0,444
U3	34	0	0	0	34	34	4,000	0,444
U4	34	0	0	0	34	34	4,000	0,444
U5	34	0	0	0	34	34	4,000	0,444
U6	34	0	0	0	34	34	4,000	0,444
U7	34	0	0	0	34	34	4,000	0,444
U8	34	0	0	0	34	34	4,000	0,444
U9	34	0	0	0	34	34	4,000	0,444
Ju	mlah	NRR	Terti	mban	g per Unsu	r =	4,	,000
Nilai SKM (Total NRR Tertimbang per l Nilai Dasar) =						Unsur X		00,00

Setelah nilai rata-rata tertimbang per unsur, maka harus diperoleh nilai dasar. Untuk memudahkan memperoleh nilai SKM antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan Nilai Dasar 25 (dua puluh lima). Untuk mengetahui nilai dari setiap unsur pelayanan maka dijabarkan sebagai berikut:

A. Persyaratan

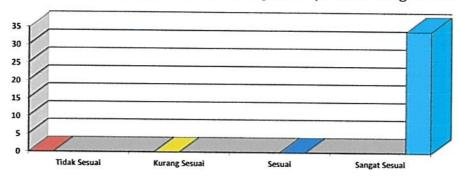
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 4,000 berada pada interval skor 3,857- 4,00 kategori "sangat baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang

lingkup persyaratan berada pada kategori **sangat baik**. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 11. Tabel Ruang Lingkup Persyaratan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak sesuai	1	0	0%
2.	Kurang sesuai	2	0	0%
3.	Sesuai	3	0	0%
4.	Sangat sesuai	4	34	100%
		Jumlah	34	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



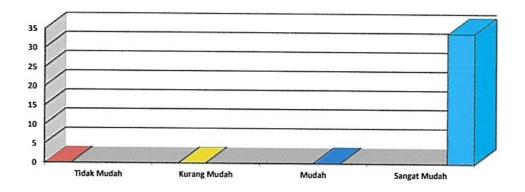
B. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar **4,000** berada pada interval skor **3,857- 4,00 kategori "sangat baik"**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur berada pada kategori **sangat baik**. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 12. Tabel Ruang Lingkup Prosedur

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Mudah	1	0	0 %
2.	Kurang Mudah	2	0	0%
3.	Mudah	3	34	0%
4.	Sangat Mudah	4	34	100%
		Jumlah	34	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



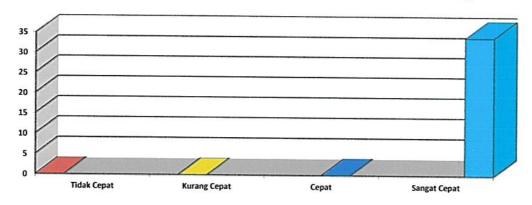
C. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh ratarata skor sebesar 4,000 berada pada interval skor 3,53 – 4,00 kategori "sangat baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan berada pada kategori sangat baik. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 13. Tabel Ruang Lingkup Waktu Pelayanan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak cepat	1	0	0%
2.	Kurang cepat	2	0	0%
3.	Cepat	3	0	0%
4.	Sangat Cepat	4	34	100%
		Jumlah	34	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



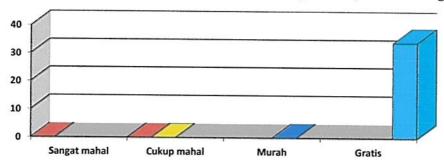
D. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 4,000 berada pada interval skor 3,53 – 4,00 kategori "sangat baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif berada pada kategori sangat baik. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 14. Tabel Ruang Lingkup Biaya/Tarif

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi		
			F	%	
1.	Sangat mahal	1	0	0%	
2.	Cukup mahal	2	0	0%	
3.	Murah	3	0	0%	
4.	Gratis	4	34	100%	
Z		Jumlah	34	100%	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



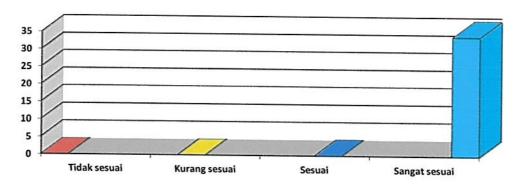
E. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 4,000 berada pada interval skor 3,935 – 4,00 kategori "sangat baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi berada pada kategori sangat baik. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi jenis pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 15. Tabel Ruang Lingkup Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak sesuai	1	0	0%
2.	Kurang sesuai	2	0	0%
3.	Sesuai	3	0	0%
4.	Sangat sesuai	4	34	100%
		Jumlah	34	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



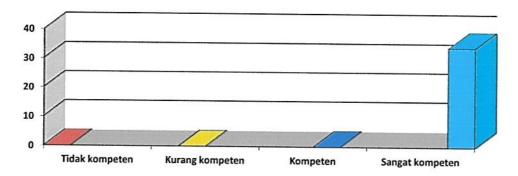
F. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 4,000 berada pada interval skor 3,53 – 4,00 kategori "sangat baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana berada pada kategori sangat baik. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 16. Tabel Ruang Lingkup Kompetensi Pelaksana

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak kompeten	1	0	0%
2.	Kurang kompeten	2	0	0%
3.	Kompeten	3	0	0%
4.	Sangat kompeten	4	34	100%
		Jumlah	34	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



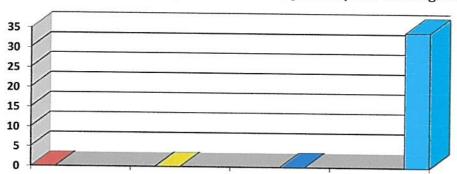
G. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar **4,000** berada pada interval skor **3,53 – 4,00** kategori **"sangat baik"**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana berada pada kategori **sangat baik**. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 17. Tabel Ruang Lingkup Perilaku Pelaksana

No.	Jawaban	SI-o-	Frekuensi	
		Skor	f	%
1.	Tidak sopan dan tidak ramah	1	0	0%
2.	Kurang sopan dan kurang ramah	2	0	0%
3.	Sopan dan ramah	3	0	0%
4.	Sangat sopan dan ramah	4	34	100%
		Jumlah	34	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Tidak Soplanrang sopan dan kurang raopan dan ramabangat sopan dan ramah

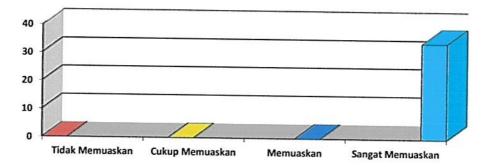
H. Sarana dan Prasarana

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 4.000 berada pada interval skor 3,53 - 4,00 kategori "sangat baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup maklumat pelayanan berada pada kategori sangat baik. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup maklumat pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Frekuensi f % Tidak Memuaskan 1 0 0% Cukup Memuaskan 0 0% Memuaskan 3 0 0% Sangat Memuaskan 4 34 100% Jumlah 34 100%

Tabel 18. Tabel Ruang Lingkup Maklumat Pelayanan

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



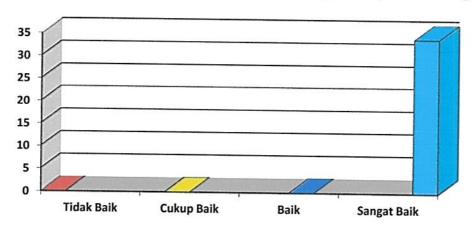
I. Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 4,000 berada pada interval skor 3,53 - 4,00 kategori "sangat baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan berada pada kategori sangat baik. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 19. Tabel Ruang Lingkup Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Baik	1	0	0%
2.	Cukup Baik	2	0	0%
3.	Baik	3	0	0%
4.	Sangat Baik	4	34	100%
		Jumlah	34	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Hasil survei pada periode ini menunjukkan bahwa Pengaadilan Negeri Gunungsitoli dalam hal penanganan pengaduan dan saran dalam kategori sangat baik. Hal ini sejalan dengan keadaan yang sebenarnya, bahwa PN Gunungsitoli sangat terbuka terhadap siapa saja yang berkeinginan untuk melaporkan atau membuat pengaduan di PN Gunungsitoli. PN Gunungsitoli telah menyediakan kotak pengaduan dan saran serta meja pengaduan yang terletak dimeja pelayanan terpadu dengan seorang petugas yang siap untuk melayani setiap masyarakat yang ingin melaporkan aparatur Pengadilan Negeri Gunungsitoli maupun pihak POSBAKUM.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B sebesar 4,00 atau 100% dan berada pada kategori Sangat Baik. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

- Persyaratan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B pada kategori Sangat Baik.
- Prosedur di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B berada pada kategori Sangat Baik;
- Waktu Pelayanan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B pada kategori Sangat Baik;
- Biaya/Tarif Pelayanan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B pada kategori Sangat Baik;
- Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B berada pada kategori Sangat Baik;
- Kompetensi Pelaksana di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B pada kategori Sangat Baik;
- Perilaku Pelaksana di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B pada kategori Sangat Baik;
- 8. Prasarana, Sarana dan Kelengkapan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B pada kategori **Sangat Baik**;
- Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B pada kategori Sangat Baik;

Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B, berdasarkan peringkat ruang lingkupnya, diperoleh kepuasan responden paling tinggi berada pada ruang lingkup yaitu Persyaratan, Prosedur dan Waktu Pelayanan. Sedangkan Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B, berdasarkan peringkat ruang lingkupnya, diperoleh kepuasan responden paling rendah berada pada ruang lingkup yaitu Persyaratan, Prosedur dan Waktu Pelayanan.

B. Saran

Kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B, hendaknya meningkatkan pelayanannya khususnya pada ruang lingkup **Persyaratan**, **Prosedur dan Waktu Pelayanan**.

Berdasarkan hasil survei ini, ketiga ruang lingkup tersebut berada pada kategori sangat baik namun pada peringkat terendah hingga ketiga terendah.

RUJUKAN:

Keputusan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/ 2/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

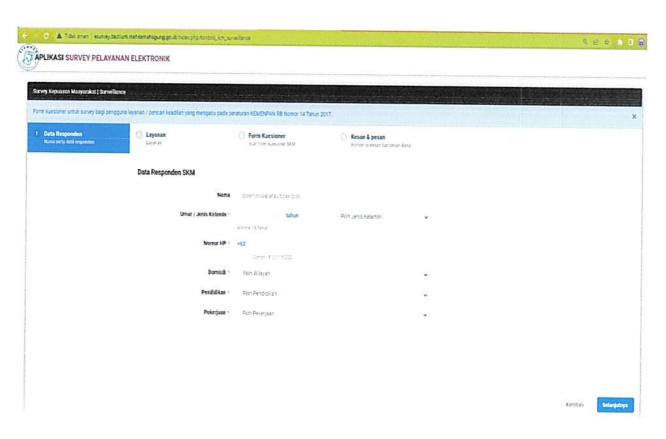
LAMPIRAN

EVIDENCE PENGISIAN SURVEY PADA APLIKASI SI SUPER





TAMPILAN APLIKASI SISUPER





Copyright © 2022 Direktorst Jenderal Badan Peradilan Umum All Rights Reserved Waktu Eksetusi : 5.5701. Penggunaan Memori : 1.1MB

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN II TAHUN 2025

